

PENSIUN DINI PLTU MASIH BURAM

Bisnis, JAKARTA — Rencana eksekusi program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) belum menunjukkan titik terang. PT PLN (Persero) belum memasukkan perincian program tersebut dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025—2034.

Atifah Rahmah Nurdita & David Eko Issetiabudi
redaksi@bisnis.com

Vice President of Energy Transition and Climate Change at PLN Anindita Satria Surya mengatakan salah satu proyek yang tengah dalam rencana dilakukan pensiun dini yakni PLTU Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 megawatt (MW).

Menurutnya, rencana itu masih dalam proses penggodokan dan belum dimasukkan ke dalam RUPTL tahun ini, tetapi diproyeksikan baru dimasukkan pada RUPTL periode 2026—2035 atau tahun depan.

"RUPTL terbaru ini selanjutnya 2025—2034, artinya masih ada 1 tahun, jadi itu belum masuk [tahun ini], masuk tapi sebagai indikasi narasi saja Cirebon akan dilakukan pensiun dini," ujar Anindita di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (13/2).

Anin menambahkan bahwa perincian detail terkait dengan penggantian pembangkit listrik setelah pensiun dini PLTU Cirebon-1 masih dalam proses. PLN saat ini juga sedang menantikan peta jalan pensiun dini PLTU yang sedang disusun oleh pemerintah. Dalam hal ini, PLN ikut berperan dalam memberikan masukan.

"Cuma untuk detail penggantian apa baru akan di RUPTL tahun depannya lagi, baru disebut akan dipensiunkan dan ada list penggantian di RUPTL 2026—2035," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahil Lahadalia memastikan tetap menjalankan pensiun dini PLTU se-

cara bertahap. Menurutnya, untuk tahap awal pemerintah berencana memensiunkan PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW).

Ketua Umum Golkar itu mengklaim pensiun dini PLTU dilakukan secara bertahap lantaran keterbatasan biaya. Di sisi lain, pihaknya tidak mau memberatkan rakyat menggunakan uang anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN).

Dia menekankan ada dua syarat untuk bisa melakukan pensiun dini PLTU. Dua syarat itu yakni ada investor yang membiayai dan ada pembangkit pengganti.

"Jadi kalau ada yang biaya murah *gira, alhamdulillah*. Bila perlu kita pensiunkan semua yang penting ada yang biaya. Jangan memaksa negara kita memensiunkan dini, tapi *ornor-ornor*, tapi uang *regak* ada," kata Bahil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2).

PLTU Cirebon 1 dipilih untuk tahap awal karena dari segi biaya yang paling memungkinkan. Pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).

Berdasarkan bahan paparan Bahil, untuk pengganti PLTU Cirebon yang akan dipensiunkan, pemerintah menyiapkan empat pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).

Keempatnya adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 346 MW, PLTS + BESS 770 MW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 1.000 MW, dan PLTSA sebesar 12 MW.

Adapun, manfaat ekonomi pensiun dini PLTU Cirebon-1 lewat pembangunan EBT bisa membuka 39.707 lapangan kerja dengan

potensi investasi US\$198 juta atau setara Rp3,25 triliun (asumsi kurs Rp16.442 per dolar).

Pemerintah dinilai telah memiliki modal yang kuat untuk melanjutkan transisi energi, utamanya pensiun dini PLTU, baik dari sisi hukum maupun ekonomi.

Sejumlah regulasi telah menjamin pelaksanaan pensiun dini PLTU sekaligus mitigasi risiko keuangan yang mungkin muncul, dan hanya tinggal menunggu ke-mauan politik dari pemerintah untuk melaksanakannya.

Peneliti Hukum Centre of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Saleh mencatat setidaknya empat kebijakan yang dapat dijadikan modal kuat transisi energi dan penutupan PLTU.

Pertama, Peraturan Presiden No. 112/2022 secara jelas telah mengatur jenis dan kriteria PLTU yang mesti dimatikan, bahkan juga mendorong pemerintah memajukan berbagai skema pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses penutupan.

Kedua, juga merupakan regulasi terbaru, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/20225 yang mengatur adanya platform transisi energi sebagai alat fiskal yang mendukung percepatan penutupan PLTU dan pengakhiran perjanjian jual beli listrik (PJBL).

"Artinya, ada penjaminan dari Kementerian Keuangan ketika ada risiko kegagalan bisnis PLN dan alokasi anggaran dari penutupan PLTU," ujarnya dalam keterangan pers, dikutip Minggu (9/2).

Ketiga, lahirnya Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). **Keempat**, diputuskannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034.

Saleh menegaskan, kendati tidak secara eksplisit menyebut PLTU mana yang harus ditutup, RUKN mempertegas amanat Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mengakhiri operasi PLTU dan

memendorong pengembangan energi terbarukan. Adapun, RUPTL kemudian juga secara tegas mendorong diversifikasi jenis pembangkit listrik. Keempat regulasi tersebut cukup untuk memberi dasar bagi pemerintah melakukan transisi energi.

Hanya ada satu amanat Perpres 112/2022 yang belum dijalankan oleh Kementerian ESDM, yaitu peta jalan pensiun dini PLTU yang mendetailkan kriteria serta skema pembiayaannya.

"Ini sangat krusial, makanya kita seharusnya mendorong Kementerian ESDM untuk segera mengeluarkan peta jalan. Saat ini, hanya itu [peta jalan] hambatan," tegas Saleh.

SPIN OFF

Dalam perkembangan lain, PT PLN (Persero) mengungkap rencana pengalihan aset atau *spin off* Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu ke PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) masih terkendala dari sisi regulasi dan perhitungan bisnis.

VP of Energy Transition and Climate Change at PLN Anindita Satria Surya mengatakan pihaknya masih menunggu payung hukum atas pengalihan aset milik PLN ke PTBA.

"Itulahnya penyerahan aset atau *spin off* kita membalikkan aset dari PLN ke PTBA itu dasarnya apa, itu yang peraturan dari Kemenuk perlu disesuaikan, perlu waktu," kata Anindita.

Dia menargetkan bahwa untuk mengalihkan PLTU Pelabuhan Ratu sebagai aset PLN dan aset negara harus melalui mekanisme yang panjang dan penyesuaian beberapa aturan.

Adapun, PLTU Pelabuhan Ratu merupakan salah satu pembangkit berbasis batu bara yang didorong untuk dihentikan operasionalnya lebih cepat atau pensiun dini dengan skema akuisisi. Pengalihan

RUPTL terbaru ini selesainya 2025—2034, artinya masih ada 1 tahun, jadi itu belum masuk [tahun ini].

PLTU berkapasitas 3x350 megawatt (MW) itu disebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pensiun dini.

Kendati demikian, Anindita menjelaskan dari sisi bisnis PLN dan PTBA disebut belum menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. PLN menargetkan akuisisi tersebut dapat mempersingkat waktu operasional PLTU.

"Tapi dari sisi bisnis ini belum bisa saling menguntungkan, dari PLN melihat itu belum look terkait harga antara kita atau PTBA belum look terkait harga maknanya masih *pending*," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan bahwa pengalihan aset PLTU Pelabuhan Ratu membutuhkan perhitungan yang cermat, baik dari sisi keekonomian maupun regulasi.

"Kalau tidak salah prosesnya itu kan kita harus menghitung dari semuanya ya, dari sisi keekonomiannya, dari sisi regulasinya," kata Arsal ditemui di Jakarta, Rabu (2/10) 2024.

Dengan proses kajian yang masih berjalan, Arsal pun memperkirakan pengalihan aset PLTU Pelabuhan Ratu tidak akan rampung dalam waktu dekat. "Nah ini proses lah prosesnya, tapi dari kita sendiri kemungkinan besar masih panjang lah itu," terangnya. ☐



Pemerintah Punya Model Baru Laksanakan Pensiun Dini PLTU Apa Itu?

Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) belum akan masuk dalam RUPTL 2025-2034

Pengalihan aset atau spin off PLTU Pelabuhan Ratu dari PLN ke PT Bukit Asam Tbk. masih terkendala regulasi dan perhitungan bisnis.

Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (%)

— Realisasi — Target

Tahun	Realisasi (%)	Target (%)
2021	12,2	14,5
2022	12,3	15,7
2023	12,5	17,9
2024	-	19,5
2025	-	23

Target Kapasitas Pembangkit Listrik EBT 2024 (MW)

Bayu	154,3
Surya	770,7
Bioenergi	3.232,9
Panas bumi	2.472,7
Air	7.255,4
Gas-batu bara	30,0

Pembangkit Listrik di Indonesia

Jenis Pembangkit Listrik	Kapasitas (MW)	Porsi (%)
PLTU	36.976	50
PLTGU	12.412	17
PLTG/MG	8.538	11
PLTD	4.986	7
PLTP	2.188	3
PLTA/MH	6.413	9
PLTS	152	0,2
PLT EBT lainnya	2.071	3